

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setiap negara akan selalu menghadapi masalah kemiskinan, tidak terkecuali Indonesia. Keberhasilan suatu pemerintahan salah satunya dapat diukur melalui penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ditinjau dari aspek geografi dan kelembagaan.

Adapun kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Jeffery Sachs (2003) menjelaskan kontribusi pemikirannya, yang menyatakan bahwa jurang pemisah negara terkaya dan termiskin di dunia disebabkan oleh perbedaan geografis. Acemoglu dan Robinson (2012) menjelaskan pandangannya bahwa posisi geografis tidak menentukan kemiskinan dalam suatu negara. Acemoglu dan Robinson membantah teori Sachs (2003) yang mengungkapkan bukan letak geografis yang menentukan kemakmuran itu negara tetapi faktor kelembagaan. Peneliti mendukung teori jeffrey Sachs karena sesuai dengan kondisi geografis yang ada di Provinsi Riau.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah faktor geografis yang terdiri dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini status daerah, letak geografis desa, letak desa dan faktor kelembagaan terdiri dari variabel pendidikan dan kesehatan.

3. Faktor geografis dalam hal ini akses jalan ke sarana pendidikan dan kesehatan. Hal itu dikarenakan jauhnya jarak yang ditempuh dengan menggunakan transportasi darat seperti sepeda motor atau mobil.
4. Faktor geografis yang signifikan terhadap jumlah orang miskin Faktor geografis yang signifikan terhadap jumlah orang miskin adalah jarak lokasi perkotaan, wilayah dataran, jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten, jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan, jarak dari desa ke SMP, jarak dari desa ke SMA, jarak rumah sakit, jarak poliklinik, jarak puskesmas, jarak rumah bersalin dan jarak tempat praktik dokter
5. Faktor kelembagaan yang signifikan terhadap jumlah orang miskin adalah Faktor kelembagaan yang signifikan terhadap jumlah adalah jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA/SMK, jumlah lembaga keterampilan, jumlah tempat praktik dokter, jumlah tempat praktik bidan, jumlah apotik, jumlah rumah sakit, jumlah rumah sakit bersalin, jumlah posyandu, jumlah dokter, jumlah bidan dan jumlah dukun
6. Faktor yang dominan mempengaruhi kemiskinan adalah faktor geografis. Alasannya variabel-variabel faktor geografis lebih banyak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dibandingkan dengan faktor-faktor kelembagaan.

5.2 Implikasi

Proses dan temuan penelitian ini, berikut hasil-hasil yang didapat implikasi tertentu, baik secara teoritik maupun kebijakan.

Beberapa implikasi itu diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Teoritik

Secara teoritik implikasi terutama berupa relevansi dan kompatibilitas teori geografi yang dikemukakan oleh Sach (2003) bahwa geografi mempengaruhi kemiskinan. Sedangkan pendapat Acemoglu & Robinson (2012) berpendapat bahwa institusi mempengaruhi kemiskinan. Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank (2006) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender akses terhadap pelayanan kesehatan dan lokasi geografis.

5.2.2 Implikasi Kebijakan

- a. Bentuk-bentuk kebijakan dan program yang ada masih dirasakan kurang efektif mengatasi kemiskinan. Investasi kelembagaan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas dan nasib suatu negara. Pendidikan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan produktivitas. Pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi sekolah dengan memberikan subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, menambah jumlah sekolah, pemerataan jumlah sekolah, memberikan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta mendorong didirikannya lembaga-lembaga pendidikan non formal yang bermutu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan

dunia kerja. Pemerintah daerah melakukan arah dan kebijaksanaan dari pembangunan bidang kesehatan seperti penambahan dan pemerataan jumlah sarana kesehatan, pemerataan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks, maka implementasi kebijakan dan program kemiskinan harus dilakukan dengan cara keseluruhan dengan melibatkan semua unsur baik dari kalangan masyarakat itu sendiri maupun dari pihak pemerintah maupun swasta, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi, sehingga akan tercipta program yang berkesmambungan.

- b. Kebijakan Program Pemerintah Penanggulangan Kemiskinan dan Bagi Hasil Propinsi Riau adalah Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Geografis Riau tidak sama wilayah kerjanya, pulau - pulau dan pedalaman banyak yang memiliki jarak tempuh berjam-jam menggunakan transportasi sungai atau laut. Oleh karena sudah sewajibnya memberikan operasional seperti anggaran.

5.3 Keterbatasan

Penelitian masih memiliki beberapa keterbatasan penelitian di antaranya adalah:

1. Peneliti hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu geografi dan kelembagaan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan panel statis.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini baru menggunakan sebagian dari faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mengetahui faktor-faktor kemiskinan yang lainnya.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan panel dinamis. Dinamis yang artinya nilai suatu variabel dipengaruhi oleh nilai variabel lain dan juga nilai variabel yang bersangkutan di masa lalu. Kemiskinan sifatnya persisten (kemiskinan periode sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kemiskinan periode saat ini).
3. Selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan adanya isu pemekaran desa dalam model analisis.